



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/646/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **71,01** yang menunjukkan dalam kategori **BB atau Sangat Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,26
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,61
d.	Evaluasi Internal	10	5,20
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,44
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>71,01</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,26** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **1,89**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi cukup memadai, namun masih terdapat hal yang perlu dilakukan penyempurnaan, yaitu target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta telah menyajikan IKU.

b) **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan**

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) **Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan**

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **17,50** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,38** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja cukup memadai, namun perlu perbaikan yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala,

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,61** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi cukup memadai, namun perlu dilakukan penyempurnaan, karena belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi cukup memadai, evaluasi proram telah dilakukan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan.

## 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,37** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi hanya sebatas evaluasi terhadap program, belum sepenuhnya untuk menilai keberhasilan program serta evaluasi atas rencana aksi belum dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa akan datang.

### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,44** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KALANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020.  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/653/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **61,93** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,93
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,37
d.	Evaluasi Internal	10	5,50
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	7,88
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>61,93</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,93** dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal **sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,90** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas

Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, hanya sebatas monitoring terhadap program dan kegiatan, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,25** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,06** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **7,37** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian

masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

**2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,95** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum dapat diandalkan.

**3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

**d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi belum memadai karena belum sepenuhnya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan.

## 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,58** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program serta evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, keberhasilan unit kerja serta rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- c. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- d. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/644/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

**4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat” untuk**

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **73,48** yang menunjukkan dalam kategori **BB** atau **Sangat Baik**

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,44
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,13
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,31
d.	Evaluasi Internal	10	6,85
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>73,48</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,44** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,94** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas kehutanan Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai hal ini ditandai dengan telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD namun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja yang disusun telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, monitoring yang dilakukan hanya sebatas monitoring terhadap pencapaian keuangan program, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **18,13** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah mempunyai dokumen IKU sebagai ukuran kinerja, serta telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari Perjanjian Kinerja hanya sampai Pejabat eselon IV.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya indikator-indikator telah memenuhi kriteria yang baik sehingga IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,31** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena belum sepenuhnya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi cukup memadai hal ini terlihat dari evaluasi program yang dilaksanakan telah menilai keberhasilan program.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **11,75** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan (Renstra).
- b. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- d. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, dalam menganalisa capaian kinerja agar memperhatikan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD, IKU OPD dan Perjanjian Kinerja tahunan.
- e. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- f. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
INSPEKTUR,  
INSPEKTORAT DAERAH  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/649/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Ketahanan  
Pangan Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **65,89** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,71
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,40
d.	Evaluasi Internal	10	3,25
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	12,97
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,89</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **20,71** dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **1,89**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal **sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **7,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi belum memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
- (2) Rencana Aksi atas kinerja belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **1,20** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, monitoring yang dilakukan hanya sebatas monitoring terhadap pencapaian keuangan program, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,56** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,06** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja telah cukup memadai, namun perlu perbaikan yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,40** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yaitu informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,15** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan organisasi.

## **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi belum memadai karena belum sepenuhnya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan.

### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hanya sebatas evaluasi terhadap pencapaian keuangan program, belum sepenuhnya untuk menilai keberhasilan program serta evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya

dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa akan datang.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,97** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan penyempurnaan terhadap rencana aksi.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala.
- e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,  
  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/651/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Sosial,  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Provinsi Jambi  
di -

**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **63,50** yang menunjukkan dalam kategori **B atau Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,96
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,96
d.	Evaluasi Internal	10	2,33
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>63,50</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23,96** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **1,83**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari yaitu telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas

Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, monitoring yang dilakukan hanya sebatas monitoring terhadap pencapaian keuangan program, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,25** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja telah cukup memadai, namun perlu perbaikan yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **9,96** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **4,64** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

## **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **2,33** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilaksanakan.

### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,83** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup

memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi hanya sebatas evaluasi terhadap pencapaian keuangan program, belum sepenuhnya untuk menilai keberhasilan program serta evaluasi atas rencana aksi belum dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,38** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **11,00** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan penyempurnaan terhadap rencana aksi.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

- g. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- h. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- i. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**INSPEKTUR,**  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020.  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/650/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambimemperoleh nilai sebesar **64,85** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,11
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,63
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,45
d.	Evaluasi Internal	10	3,50
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,16
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,85</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23,11** dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,89** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,22** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai..

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **15,63** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal.

### **2) Kualitas Pengukuran**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik dan cukup untuk mengukur kinerja, namun pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **8,45** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,84** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan

evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi cukup memadai, evaluasi program telah dilakukan, akan tetapi evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,33** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang

akan datang dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,16** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

**6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- g. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

- h. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- i. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020 .  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/654/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **60,20** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,01
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,93
d.	Evaluasi Internal	10	4,00
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	10,95
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,20</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23,01** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,94** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja

yang dibuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, hanya sebatas monitoring terhadap program dan kegiatan, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **15,31** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **6,93** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,21** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **0,90** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **0,92** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi belum cukup memadai, karena belum sepenuhnya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

## **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,95** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, keberhasilan unit kerja dan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang serta rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **10,95** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H/ KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020 .  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/656/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kepemudaan  
dan Olahraga  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **56,07** yang menunjukkan dalam kategori **CC** atau **Cukup (Memadai)**

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,41
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,67
d.	Evaluasi Internal	10	6,20
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	4,73
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>56,07</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,41** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,89** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi belum sepenuhnya memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai, hal ini terlihat dari target kinerja belum ditetapkan dengan baik.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, hanya sebatas monitoring terhadap program dan kegiatan sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,06** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **8,44** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **1,56** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*, serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **8,67** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,84** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,03** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **6,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi telah memadai.

## 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,99** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya dimonitoring sehingga belum sepenuhnya bisa mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,73** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Menetapkan target kinerja didalam rencana kinerja tahunan secara baik.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Evaluasi akuntabilitas agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- i. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/645/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **72,08** yang menunjukkan dalam kategori **BB atau Sangat Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,91
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,35
d.	Evaluasi Internal	10	3,88
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	15,38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,08</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23,91** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **1,89**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

(1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

(2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta telah menyajikan IKU.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **9,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,56** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,06** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja telah cukup memadai, namun perlu perbaikan yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,35** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **5,98** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,38** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan organisasi.

### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,88** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jambi belum memadai karena evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilaksanakan.

## **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi hanya sebatas evaluasi terhadap program, belum sepenuhnya untuk menilai keberhasilan program serta evaluasi atas rencana aksi belum dilaksanakan sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa akan datang.

### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **15,38** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
MIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020.  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/658/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perpustakaan  
dan Arsip Daerah Provinsi  
Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **54,81** yang menunjukkan dalam kategori **CC** atau **Cukup (Memadai)**

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,39
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,57
d.	Evaluasi Internal	10	3,29
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	10,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>54,81</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **21,39** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,61** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya dan dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga

mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

b) **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan**

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) **Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan**

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **12,81** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

- (1) Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **6,57** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

##### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,14** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,29** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **0,80** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

**2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,74** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

**3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **10,75** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

**6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.

- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU melalui website resmi Pemerintah yang memudahkan publik untuk mengakses.
- d. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
- e. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- f. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- g. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- h. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- j. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020.  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/652/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Tanaman  
Pangan Hortikultura dan  
Peternakan Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **62,83** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,15
d.	Evaluasi Internal	10	4,25
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,67
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,83</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **18,45** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan dan dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,53** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi cukup memadai, telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD namun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja

yang dibuat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi belum cukup memadai karena belum terdapat Rencana Aksi atas kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **1,20** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai karena tidak terdapat rencana aksi atas kinerja sehingga tidak dapat diketahui pencapaian atas kinerja secara berkala

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **15,31** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

(1) Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

(2) Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,06** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja cukup memadai, hal ini terlihat dari IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik dan telah selaras dengan IKU IP, namun pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala dan belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta tidak terdapat bukti bahwa IKU telah direviu secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **11,15** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,06** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, namun belum diupload ke dalam website.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja sudah cukup memadai tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **3,38** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup memadai yaitu Informasi yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi belum memadai karena tidak terdapat Rencana Aksi atas kinerja..

## 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program. Rencana Aksi atas Kinerja yang tidak dibuat menyebabkan pengendalian kinerja tidak dapat dilakukan secara optimal dalam memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, akan tetapi karena Rencana Aksi tidak ada maka kinerja yang telah dicapai belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,67** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan.
- b. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan Laporan Kinerja melalui website resmi Pemerintah yang memudahkan publik untuk mengakses.
- c. Membuat Rencana Aksi atas Kinerja dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan sub kegiatan yang akan dilakukan, sehingga memudahkan pihak yang berkompeten untuk memonitor pencapaiannya secara berkala dan dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- d. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya,
- f. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/648/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa  
Daerah Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

**4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat” untuk**

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **68,87** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,51
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,15
d.	Evaluasi Internal	10	4,91
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,49
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,87</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **21,51** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,89** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,22** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitoring sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (3) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **7,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **17,81** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,38** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengukuran kinerja belum sampai pada kinerja individu (staf).
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,15** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **4,64** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta data dukung yang kurang relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

## **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,05** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilaksanakan.

### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,37** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan

evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,49** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
- d. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan

- perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
  - g. Agar mempedomani Dokumen Renstra dan IKU OPD dalam menyusun perjanjian kinerja tahunan.
  - h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Gubernur Jambi, sebagai laporan



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 75,31 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik.

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,18
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,22
d.	Evaluasi Internal	10	8,64
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	16,98
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75,31</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,18** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Dokumen Perencanaan Strategis**

a) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

b) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Target jangka menengah telah di monitor pencapaiannya
- (3) Telah dilakukan reuiu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

**2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.**

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan.

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan.

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **7,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memenuhi kualitas:

1. Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
2. Kegiatan belum sepenuhnya merupakan cara untuk mencapai sasaran.
3. Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD/Renstra
4. Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

- (2) Target kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
- (3) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- (4) Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- (5) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **17,50** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **10,63** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai.

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi belum memadai karena dalam implementasinya belum memenuhi indikator-indikator yang baik seperti:

1. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
3. Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya.
4. hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
5. *IKU telah direviu* secara berkala.
6. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **11,22** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena:

1. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
3. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
4. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.

## d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **7,43** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah cukup memadai.

### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,68** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan sudah sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **16,98** dari nilai maksimal sebesar **20,00**.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **11,98** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

#### 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- b. Kegiatan belum sepenuhnya merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c. Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD/Renstra
- d. Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
- e. Rencana Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- f. Target kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
- g. Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- h. Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- i. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
- j. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- k. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
- l. Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya.
- m. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- n. IKU *telah direviu* secara berkala.
- o. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- p. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- q. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.
- r. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- s. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
- t. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.
- u. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 83,96 yang menunjukkan dalam kategori A atau Memuaskan.

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,85
b.	Pengukuran Kinerja	25	22,19
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,11
d.	Evaluasi Internal	10	8,88
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	16,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>83,96</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **26,85** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sudah cukup memadai namun tetap harus disempurnakan lagi sehingga bias mencapai skor 5.

###### b) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Target jangka menengah telah di monitor pencapaiannya
- (3) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **9,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Rencana Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

#### b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **22,19** dari nilai maksimal sebesar **25,00**.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

## 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **12,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai.

## 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **13,11** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **6,51** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja telah sepenuhnya memadai.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 16 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **7,56** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah cukup memadai.

#### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,68** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja telah cukup memadai.

### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,25** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Rencana Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- c. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 50,06 yang menunjukkan dalam kategori CC atau Cukup

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,03
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	4,68
d.	Evaluasi Internal	10	3,79
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	4,25
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>50,06</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>C</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,03** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sudah cukup memadai namun tetap harus disempurnakan lagi sehingga bias mencapai skor 5.

###### b) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 1,75 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Target jangka menengah belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya
- (3) Telah dilakukan reviu atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **7,75** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat perlu mendapatkan perhatian yaitu :

- (1) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala
- (2) Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **15,00** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **8,13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD belum sepenuhnya cukup memadai.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **4,68** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih banyak terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,44** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan telah menyampaikan tepat waktu.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,34** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi belum dapat menjelaskan capaian atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati di awal tahun anggaran, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian atas capaian kerjanya, dalam LKJ Dinas Perkebunan hanya menjelaskan tentang capaian Kerja program/kegiatan bukan capaian kinerja.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **0,9** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **3,79** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,59** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,46** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **1,75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja tidak dapat diukur karena perbedaan satuan target antara PK dengan LKJ.
- (2) Capaian kinerja yang diukur dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebatas capaian program/kegiatan bukan nya capaian kinerja yang di perjanjikan.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja tidak bisa diukur.
- (2) Capaian kinerja tidak bisa dibandingkan.
- (3) Informasi kinerja belum cukup dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala.
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*
- d. Melakukan Reviu terhadap IKU secara berkala.
- e. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- f. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- g. Capaian target dalam Laporan Kinerja harus memiliki satuan yang sama dengan target yang diperjanjikan didalam dokumen PK pada awal tahun anggaran sehingga bias dilakukan penilaian dan pengukuran atas capaian yang telah di lakukan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020 .  
Muharram 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal

WPJ	PT	KT

e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 73,67 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,79
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,07
d.	Evaluasi Internal	10	6,85
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	9,66
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>73,67</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

WPJ	PT	KT

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,20** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

WPJ	PT	KT

(2) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **20,31** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **10,63** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,22** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

##### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,81** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

WPJ	PT	KT

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Kabupaten Bungo memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,61** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **7,61** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

WPJ	PT	KT

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Koperasi  
dan UKM  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Tahun 2020, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 57,11 yang menunjukkan dalam kategori CC atau Cukup

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,27
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,80
d.	Evaluasi Internal	10	2,13
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,54
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>57,11</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>C</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **17,27** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **3,91 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sudah cukup memadai namun tetap harus disempurnakan lagi sehingga bias mencapai skor 5.

###### b) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 1,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Target jangka menengah belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya
- (3) Telah dilakukan reviu atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi belum memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai dikarekan Dinas Koperasi belum menyusun Rencana Aksi atas Kinerja sehingga mempengaruhi dalam penilaian kualitas perencanaan kinerja tahunan.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **1,20** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat perlu mendapatkan perhatian yaitu :

- (1) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,38** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD belum sepenuhnya cukup memadai.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **9,80** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih banyak terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan telah menyampaikan tepat waktu.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,29** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **2,13** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi belum cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **0,63** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja tidak cukup memadai karena pemantauan rencana aksi tidak dilaksanakan sehingga belum memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **0,38** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,54** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,54** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala.
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*
- d. Melakukan Reviu terhadap IKU secara berkala.
- e. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- f. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020  
Muharram 1442

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal

WPJ	PT	KT

e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Kesbangpol Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 78,59 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,36
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,88
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,03
d.	Evaluasi Internal	10	5,25
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	16,08
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,59</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

WPJ	PT	KT

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **26,36** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,78** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun Renstra belum dipublikasikan.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,53** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10** dari nilai maksimal sebesar **10**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,8** dari nilai maksimal sebesar **6**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

WPJ	PT	KT

(2) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,88** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **3,44** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **9,38** dari nilai maksimal sebesar **12,5**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup baik, namun pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, namun Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala belum sempurna dilaksanakan.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **14,03** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

##### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

##### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

WPJ	PT	KT

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,28** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **5,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **16,08** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **6,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,58** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

WPJ	PT	KT

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**INSPEKTUR**  
PEMERINTAH PROVINSI  
INSPEKTORAT  
DAERAH  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi  
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : [www.inspektorat@jambiprov.go.id](http://www.inspektorat@jambiprov.go.id)

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas P3AP2  
Provinsi Jambi  
di-  
Jambi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tentang melaksanakan evaluasi SAKIP pada OPD Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2020.

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

## 3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk (P3AP2) Provinsi Jambi selama tahun 2019 terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang terdiri dari:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

#### 4. Kategori dan Bobot Penilaian

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinejra untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sedangkan bobot penilaian komponen atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a.Rencana Strategis (10%), meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b.Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a.Pemenuhan pengukuran (5%) b.Kualitas Pengukuran (12,5%) c.Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a.Pemenuhan pelaporan (3%) b.Kualitas pelaporan (7,5%) c.Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Kinerja	10%	a.Pemenuhan Evaluasi (2%) b.Kualitas Evaluasi (5%) c.Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a.Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b.Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark/kinerja lainnya) (5%)

## 5. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2019 memperoleh kategori “A” interpretasi **Memuaskan** dengan nilai **85,68** yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,90
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,88
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,31
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,85
5	Capaian Kinerja	20%	15,74
<b>TOTAL NILAI</b>			<b>85,68</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **28,90** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

###### **a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra**

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah mencakup tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator), terdapat target tahunan, dan telah menyajikan IKU serta telah dipublikasikan..

###### **b) Kualitas Dokumen Renstra**

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas dokumen Renstra yang dibuat telah mencakup tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan telah selaras dengan dokumen RPJMD.

###### **c) Implementasi Dokumen Renstra**

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring Renstra secara periodik;
- Belum terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah yang dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
- Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*).

##### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

###### **a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan**

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen

perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun dan perjanjian kinerja telah memuat indikator kinerja utama serta telah dipublikasikan.

b) **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan**

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang baik.

c) **Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan**

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **5,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Dengan demikian masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
- Target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **20,88** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Pemenuhan pengukuran kinerja telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya, terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **12,19** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Kualitas pengukuran kinerja cukup memadai diantaranya :

- IKU dan ukuran indikator kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
- Terdapat ukuran indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan pengukuran sudah dilakukan secara berjenjang.

Namun demikian terdapat catatan yang perlu perbaikan sebagai berikut :

- Data kinerja yang diperoleh belum tepat waktu.

### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Dengan demikian masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor namun belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring kinerja tersebut;
- Belum terdapat dokumen yang membuktikan bahwa IKU telah direviu;
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah dibuat namun hasil pengukuran RA belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dan belum menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## C. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,31** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Pemenuhan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah memenuhi seluruh kriteria penilaian yaitu laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu, telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan telah diupload ke dalam website.

### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja telah cukup memadai dengan menyajikan pencapaian sasaran kinerja yang berorientasi outcome dan menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang perlu penyempurnaan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja seluruh sasaran (*outcome*);
- Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan target vs realisasi capaian instansi sejenis yang setara atau sekelas;
- Belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

## **D. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi telah cukup memadai, namun belum terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana dan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana.

### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja cukup memadai, namun terdapat beberapa yang perlu penyempurnaan diantaranya :

- Belum terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi atas evaluasi program yang dilaksanakan telah/akan ditindaklanjuti;
- Pemantauan atas Rencana aksi belum dilakukan secara bulanan;
- Belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan belum sepenuhnya/sebagian memberikan alternative perbaikan.

### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas atas rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

## **E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **15,74** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **6,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- a) Target kinerja dapat tercapai.
- b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- c) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,24** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini diperoleh dari penilaian indikator yang meliputi :

- a) Target kinerja dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 131,75%;
- b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian sebesar 125,15%;
- c) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dengan melengkapinya indikator kinerja tujuan yang relevan serta menggunakan dokumen perencanaan tersebut sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring Renstra secara periodik dan mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah serta melaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
- c. Menyusun SOP/mekanisme pengumpulan data kinerja yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi, agar diperoleh informasi tepat waktu dan memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*);

- d. Melakukan reuiu internal atas IKU secara priodik dalam upaya meningkatkan kualitas indikator agar lebih relevan dan cukup untuk mempresentasikan kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- e. Melakukan pemantauan Rencana Aksi atas kinerja per bulan. Hal ini penting agar kinerja yang telah diperjanjikan dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan sebagai sarana evaluasi kinerja;
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan baik;
- g. Menguraikan hasil evaluasi dan analisa tentang capaian-capaian kinerja seluruh sasaran/outcome dalam Laporan Kinerja;
- h. Menyajikan perbandingan target vs realisasi capaian instansi dengan instansi sejenis yang setara atau sekelas dalam Laporan Kinerja;
- i. Membuat analisa, simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan atas program/kegiatan sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu program/kegiatan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dan diharapkan menindaklanjuti rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi ini guna meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga penyajian Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020  
Muharram 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perindag  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal

WPJ	PT	KT

e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 65,03 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,98
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,07
d.	Evaluasi Internal	10	5,08
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	12,85
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,03</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

WPJ	PT	KT

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,98** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Dokumen Perencanaan Strategis**

a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra sudah memadai.

b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

**2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,1** dari nilai maksimal sebesar **6**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai.

WPJ	PT	KT

## b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,06** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **4,38**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **7,81** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- (2) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi belum memadai karena:

- (1) Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- (2) IKU belum direviu secara berkala.

## c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,07** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,55** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

WPJ	PT	KT

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,7** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **5,08** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,59** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi belum cukup memadai karena hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,37** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,85** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5** dari nilai maksimal sebesar **7,5**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

WPJ	PT	KT

## 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **7,85** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi,      September 2020  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala BAPPEDA  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

WPJ	PT	KT

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 84,01 yang menunjukkan dalam kategori A atau memuaskan.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,50
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	15,00
d.	Evaluasi Internal	10	6,58
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,25
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>84,01</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **28,50** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Dokumen Perencanaan Strategis**

a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai,

**2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- (2) Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

WPJ	PT	KT

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **19,69** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **10,31** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) IKU belum cukup untuk mengukur kinerja
- (2) Belum sepenuhnya terdapat ukuran kinerja individu yang mengacu kepada IKU organisasi.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena IKU belum direviu secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **15,00** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal sebesar **4,50**.

## **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,58** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jambi telah cukup memadai.

**2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,20** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena :

1. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
2. Pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode

**3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **4,25** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini belum memadai terlihat dari penilaiain indikator yaitu capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

**2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini belum memadai terlihat dari penilaiain indikator yaitu capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

**6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

WPJ	PT	KT

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan monitoring terhadap rencana aksi.
- c. Melakukan upaya agar capaian target kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020  
Muharram1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Sekretaris DPRD  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

WPJ	PT	KT

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sekretariat DPRD Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 75,15 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,68
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,31
d.	Evaluasi Internal	10	6,29
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,13
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75,15</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **26,68** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Sekretariat DPRD Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 1,75 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Sekretariat DPRD Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar 4,80 dari nilai maksimal sebesar **6,00**.

#### b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **20,31** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

WPJ	PT	KT

## 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun namun masih terdapat kelemahan yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)

## 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun IKU belum dilakukan reviu secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,31** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara rinci.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Sekretariat Dewan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,29** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD memperoleh nilai sebesar **1,59** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi telah cukup memadai namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu

WPJ	PT	KT

hasil evaluasi belum disampaikan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,20** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
2. Pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode

## 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **11,13** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **4,25** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja belum sepenuhnya tercapai.
- (2) Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **6,88** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja belum sepenuhnya tercapai.
- (2) Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dan melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja.

WPJ	PT	KT

- c. Melakukan upaya agar target kinerja dapat tercapai dan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : [www.inspektorat@jambiprov.go.id](http://www.inspektorat@jambiprov.go.id)

## LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR : LAP-700/363 /ITPROV-3/IX/2020 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/225/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tentang melaksanakan evaluasi Sakip pada OPD Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2020.

### 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

### 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
  - b. Pengukuran Kinerja
  - c. Pelaporan Kinerja
  - d. Evaluasi Internal
  - e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

WRJ	PT	KT
4	9	11

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel,berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinejra untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 80,12 yang menunjukkan dalam ketegori A atau Memuaskan.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,15
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,58
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,85
5	Capaian Kinerja	20%	12,23
	<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>	<b>100</b>	<b>80,12</b>
	<b>TINGKAT AKUNTABILITAS</b>		<b>A</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

WFJ	PT	KT
1	1	2

## a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **28,15** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah mencakup tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator), terdapat target tahunan, dan telah menyajikan IKU serta telah dipublikasikan.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas dokumen Renstra yang dibuat telah mencakup tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, Indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan telah selaras dengan dokumen RPJMD.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring Renstra secara periodik;
- Terdapat beberapa kegiatan yang ada pada rencana kerja dan anggaran tidak terdapat pada dokumen Renstra
- Belum terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah yang dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
- Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*).

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah memenuhi seluruh indikator penilaian dimana Perjanjian Kinerja yang disusun telah memuat indikator kinerja utama dan telah dipublikasikan.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang baik.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **5,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*)
- Target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan dasar (acuan) untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan;
- Target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan.

## b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **20,00** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

WRJ	PT	KT
4	7	3

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar 5,00 dari nilai maksimal sebesar 5,00. Pemenuhan pengukuran kinerja telah memenuhi indikator penilaian yaitu terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya, terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.

#### 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar 10,94 dari nilai maksimal sebesar 12,50. Kualitas pengukuran kinerja cukup memadai dimana IKU dan ukuran indikator kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator yang baik. Namun demikian terdapat catatan perbaikan sebagai berikut :

- Belum semua terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan;
- Pengukuran kinerja sudah dilakukan, namun pengukuran tidak sampai ke individu staf;
- Data kinerja yang diperoleh belum tepat waktu.

#### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 4,38 dari nilai maksimal sebesar 7,50. Dengan demikian masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan diantaranya yaitu :

- Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor namun belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring kinerja tersebut;
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah dibuat namun hasil pengukuran RA belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dan belum menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar 12,58 dari nilai maksimal sebesar 15,00. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal sebesar 3,00. Pemenuhan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi seluruh kriteria penilaian yaitu laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu, telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan telah diupload ke dalam website.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar 5,98 dari nilai maksimal sebesar 7,50. Penyajian Informasi Kinerja telah cukup memadai dengan menyajikan pencapaian sasaran kinerja yang berorientasi outcome dan menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang perlu penyempurnaan sebagai berikut :

- Belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- Belum mencantumkan sumber data.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar 3,60 dari nilai maksimal sebesar 4,50. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

WPJ	PT	KT
4	7	4

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi cukup memadai, namun belum terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana dan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja cukup memadai, namun terdapat beberapa yang perlu penyempurnaan diantaranya :

- Belum terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi atas evaluasi program yang dilaksanakan telah/akan ditindaklanjuti;
- Pemantauan atas Rencana aksi belum dilakukan secara bulanan;
- Belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan belum sepenuhnya/sebagian memberikan alternative perbaikan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas atas rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,23** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (*Output*)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **3,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- a) Target kinerja belum dapat tercapai.
- b) Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.
- c) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,73** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini diperoleh dari penilaian indikator yang meliputi:

- a) Target kinerja belum dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **89,80%**;
- b) Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian sebesar **97,94%**
- c) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

WPJ	PT	KT

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, direkomendasikan agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dengan melengkapinya indikator kinerja tujuan yang relevan serta menggunakan dokumen perencanaan tersebut sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring Renstra secara periodik dan mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah serta melaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
- c. Menyusun SOP/mekanisme pengumpulan data kinerja yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi, agar diperoleh informasi tepat waktu dan memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*);
- d. Menyusun perjanjian kinerja/indikator kinerja individu sampai pada ke level staf;
- e. Melakukan reviu internal atas IKU secara priodik dalam upaya meningkatkan kualitas indikator agar lebih relevan dan cukup untuk mempresentasikan kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- f. Melakukan pemantauan Rencana Aksi atas kinerja per bulan. Hal ini penting agar kinerja yang telah diperjanjikan dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan sebagai sarana evaluasi kinerja;
- g. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi ini guna meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga penyajian Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
INSPEKTUR,



**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

IRBANWIL II,



**Ir. AINUL IRFAN, M.T.P**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650915 199303 1 005

WFJ	PT	KT
		



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Kepala BPSDM Provinsi Jambi  
Lampiran : - di -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019** **Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

**4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **66,60** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,41
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	5,79
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,17
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>66,60</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar 23,41 dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,83** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 dan pada tahun 2019 Renstra telah dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau media lainnya.

b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

## 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai. Pada tahun 2019 PK telah dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau media lainnya.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai hal terlihat dari :

- (1) Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, dan
- (2) Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

## b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **12,81** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.

## 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **6,56** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
- (2) Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

## 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* dan IKU belum direviu secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Laporan Kinerja sudah di upload kedalam website.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dan untuk menilai serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **5,79** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,59** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah cukup memadai.

### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,71** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan belum memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

## **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian terhadap 6 indikator, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,17** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,17** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik cukup dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup sepenuhnya dapat diandalkan.

## **5. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.

- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- c. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- d. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- e. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1442

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
& Informatika Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **62,93** yang menunjukkan masuk dalam kategori **B** atau **Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,97
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	4,50
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,54
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,93</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **21,97** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,67** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dipublikasikan.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **3,91 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Kualitas dokumen Renstra yang dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sudah cukup memadai. Namun terdapat beberapa kriteria yang belum lengkap , yaitu terkait dengan:

1. Indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
2. Program/kegiatan belum sepenuhnya merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan.
3. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD;
4. Dokumen Renstra belum sepenuhnya telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum memadai, hal ini terlihat dari :

1. Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA;
2. Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
3. Dokumen Renstra belum sepenuhnya direviu secara berkala.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai telah dipublikasikan.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

belum sepenuhnya memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

Kualitas perencanaan kinerja tahunan belum memenuhi kualitas dokumen yang baik karena dalam dokumen tersebut belum memenuhi beberapa kriteria yang terkait dengan:

1. Sasaran belum sepenuhnya berorientasi hasil;
2. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik;
4. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung anggaran yang memadai;
5. Dokumen PK belum selaras dengan RPJMD/Renstra;
6. Dokumen PK belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;
7. Rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

1. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
2. Target kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk mengukur keberhasilan;
3. Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
4. Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
5. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **12,50** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **6,25** dari nilai maksimal sebesar **12,50**

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD belum sepenuhnya memadai dan memerlukan perbaikan sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang;
2. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;

3. Belum terdapat pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi yang dilakukan secara berkala;
4. Belum terdapat pengukuran kinerja yang sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi belum memadai dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Adapun kriteria-kriteria yang memerlukan perbaikan adalah sbb:

1. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
3. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
4. Informasi kinerja dalam Laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Adapun kriteria-kriteria yang memerlukan perbaikan:

1. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan;
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

3. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja;
4. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi cukup memadai, namun hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,95** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan, dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan di setiap periode.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian terhadap 14 indikator, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,54** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,00**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,54** dari nilai maksimal sebesar **12,5**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

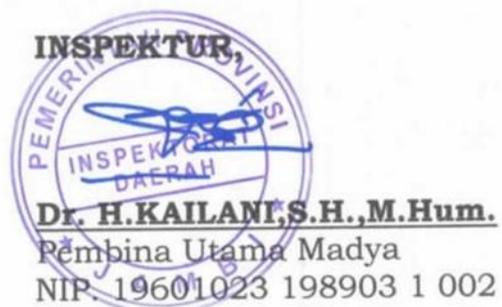
- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Analisis kinerja cukup memadai.
- (4) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tujuan berjalan.
- b. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- c. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- d. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- e. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Dzulhijjah 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Penghubung  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Penghubung Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 65,48 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,75
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,15
d.	Evaluasi Internal	10	5,12
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,08
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,48</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **21,75** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Penghubung Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Penghubung Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **7,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Penghubung Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,38** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **8,13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Penghubung Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,15** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Penghubung Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,64** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Penghubung Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **5,12** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Penghubung Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,58** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14,08** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **4,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,58** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

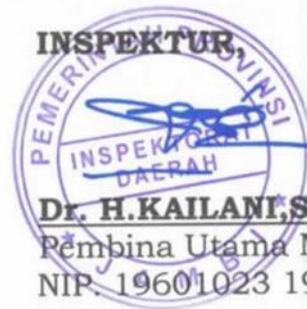
- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Penghubung Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020  
Muharam 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 76,38 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,24
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,69
d.	Evaluasi Internal	10	5,20
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	16,25
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>76,38</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

## a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,24** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,89** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sudah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai namun belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
- (2) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **20,00** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **10,31** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- (2) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,69** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,81** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah memadai, namun laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara kuantitatif.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan, untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untuk peningkatan kinerja.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **5,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,37** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **16,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Sebagian besar target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Sebagian besar informasi data kinerja telah dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **11,25** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Sebagian besar informasi data kinerja telah dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Serta menjadikan capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.
- c. Menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas sebagai dasar perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja melalui pelaksanaan tindak lanjut atau rekomendasi atas monitoring dan evaluasi rencana aksi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2019  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah Provinsi Jambi  
di **Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0** s.d. **100**. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **60,72** yang menunjukkan dalam kategori B (Baik)

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,8
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,23
d.	Evaluasi Internal	10	4,50
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,63
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,72</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap **20** indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,50** dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **8,35**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- (3) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40**, dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap **20** indikator kinerja, nilai yang dicapai **11,88** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **6,25** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
- (2) Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* dan IKU belum direviu secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap **16** indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,23** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 namun.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap **12** indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,95** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian terhadap **6** indikator, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **11,63** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **3,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Analisis kinerja cukup memadai.
- (4) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- c. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
- d. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Sya'ban 1440 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IV/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kelautan  
dan Perikanan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 76.65 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	28.50
b.	Pengukuran Kinerja	25	14.38
c.	Pelaporan Kinerja	15	13.38
d.	Evaluasi Internal	10	6.20
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14.20
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>76.65</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **28.50** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5.00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sudah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **3.00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi sudah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4.00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10.00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4.50** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14.38** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4.38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Belum terdapat terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **7.50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **2.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi belum cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **13.30** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **6.96** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2.29** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **14.20** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **6.70** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020.  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 61,59 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,12
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,50
d.	Evaluasi Internal	10	5,41
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,19
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>61,59</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **18,12** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,51** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,97 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,38** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

- (1) Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- (2) Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (3) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,50** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **5,18** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,41** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,58** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,19** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, dari output-output yang dilaporkan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi belum memadai. Hal yang perlu ditingkatkan adalah capaian-capaian indikator outcome yang telah ditetapkan targetnya.

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **3,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan, prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut dan memperhatikan format laporan yang berlaku.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Sya'ban 1440 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IV/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 65.73 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.60
b.	Pengukuran Kinerja	25	13.75
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.88
d.	Evaluasi Internal	10	6.20
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	10.30
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65.73</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **25.60** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5.00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sudah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **3.00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi sudah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4.00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8.00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3.60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **13.75** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4.38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **6.88** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **2.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi belum cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **9.88** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4.37** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2.70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Perhubungan memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi belum cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2.99** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **10.30** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **5.30** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Daerah Provinsi Jambi  
di

**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam dan Kebakaran memperoleh nilai sebesar 67,27 yang menunjukkan dalam kategori B (Baik)

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam dan Kebakaran dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,31
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	6,85
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>67,27</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar 24,31 dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,83** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam dan Kebakaran telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar 4,38 **dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam dan Kebakaran sudah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar 3,75 dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

### b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap **20** indikator kinerja, nilai yang dicapai **14,69** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. sudah memadai.

## 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **6,56** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Pengumpulan Data kinerja atas rencana aksi belum di lakukan secara berkala
- (2) Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

## 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* dan IKU belum direviu secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap **16** indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Telah memadai.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam dan Kebakaran.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap **12** indikator, evaluasi internal atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah cukup memadai.

## **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja cukup memadai

## **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian terhadap **6** indikator, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian Daerah mendapat nilai sebesar **6,34** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **3,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

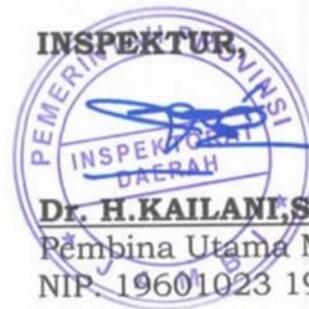
- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Analisis kinerja cukup memadai.
- (4) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **5. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Agar rencana kinerja tahunan dapat dimanfaatkan dalam menyusun anggaran
- b. Melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Akasi di lakukan secara berkla (bulanan/triwulan /semesteran
- c. Melakukan pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H.KAILANI, S.H., M.Hum.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020.  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum & Perumahan  
Rakyat Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

**4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat” untuk**

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 62,91 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	6,85
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	10,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,91</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **21,39** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Dokumen Perencanaan Strategis**

- a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,61** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memadai.

c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

## 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

## b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **12,81** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

- (1) Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

## **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (3) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **6,57** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,14** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai

karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,29** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **0,80** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,74** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **10,75** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, dari output-output yang dilaporkan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum memadai. Hal yang perlu ditingkatkan adalah capaian-capaian indikator outcome yang telah ditetapkan targetnya.

#### **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU melalui website resmi Pemerintah yang memudahkan publik untuk mengakses.

- d. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- e. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- f. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- g. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- h. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- i. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020 .  
Muharam 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala RSUD Raden  
Mattaher Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 66,31 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,20
b.	Pengukuran Kinerja	25	10,94
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	6,85
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,91
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>66,31</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,20** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sudah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai namun belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **10,94** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,63** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Perlu adanya reviu atas indikator kinerja utama unit kerja.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- (3) Rencana Aksi atas Kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **0,94** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi kurang memadai karena dalam implementasinya belum memenuhi indikator-indikator yang baik, sehingga perlu adanya perbaikan sebagai berikut :

- (1) Memanfaatkan indikator kinerja utama unit kerja dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Melakukan reviu atas indikator kinerja secara berkala.
- (3) Memanfaatkan pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah memadai, namun laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara kuantitatif.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan, untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untuk peningkatan kinerja.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah memadai.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,91** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Sebagian besar target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Sebagian besar informasi data kinerja telah dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,91** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Sebagian besar target kinerja dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

(3) Sebagian besar informasi data kinerja telah dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan penyempurnaan atas data kinerja sebagai berikut :
  - 1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
  - 2) Rencana Aksi atas Kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala
  - 3) Memanfaatkan indikator kinerja utama unit kerja dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
  - 4) Melakukan reviu atas indikator kinerja secara berkala.
  - 5) Memanfaatkan pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d. Menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas sebagai dasar perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja melalui pelaksanaan tindak lanjut atau rekomendasi atas monitoring dan evaluasi rencana aksi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Zulhidjah 1441 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 63,81 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,75
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,15
d.	Evaluasi Internal	10	5,12
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,08
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,48</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23,00** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat telah memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **10,94** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **5,63** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **0,94** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,20** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Hukum Stda Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **2,99** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **13,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **4,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020.  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Kesramas  
Setda Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesramas Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 54,54 yang menunjukkan dalam kategori CC atau Cukup (Memadai)

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Kesramas Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,46
b.	Pengukuran Kinerja	25	10,63
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	5,29
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	8,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>54,54</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **19,46** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,78** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Kesramas Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **3,28 dari nilai maksimal sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini disebabkan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dan tidak terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **6,75** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **10,63** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

- (1) Belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.
- (2) Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **5,63** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (3) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **0,94** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Kesramas Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### d. Evaluasi Internal

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,29** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,59** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

##### 2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,58** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

##### 3) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, dari output-output yang dilaporkan menunjukkan bahwa kinerja Biro Kesramas Provinsi Jambi belum memadai. Hal yang perlu ditingkatkan adalah capaian-capaian indikator outcome yang telah ditetapkan targetnya.

##### 1) Kinerja yang dilaporkan (Output)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan, prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut dan memperhatikan format laporan yang berlaku.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020.  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-4/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Umum Setda  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/226/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Umum Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 65,60 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,21
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	5,41
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	12,13
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,60</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **24,21** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,89** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Biro Umum Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun dokumen Renstra tersebut telah dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,22** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Umum Setda Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor secara baik pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Umum Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

### b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **13,44** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

- (1) Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Umum Provinsi Jambi, tetapi belum maksimal dilaksanakan.

### 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **6,88** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (3) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Umum Setda Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10,42** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Umum Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan

perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,41** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **2,58** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,13** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, dari output-output yang dilaporkan menunjukkan bahwa kinerja Biro Umum Provinsi Jambi belum memadai. Hal yang perlu ditingkatkan adalah capaian-capaian indikator outcome yang telah ditetapkan targetnya.

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **4,00** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- b. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU melalui website resmi Pemerintah yang memudahkan publik untuk mengakses.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- d. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- e. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- f. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Umum Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020 .  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/647/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth Kepala Biro Pengelolaan  
Barang Milik Daerah Setda  
Provinsi Jambi  
Di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **70,90** yang menunjukkan dalam kategori **BB** atau **Sangat Baik**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,31
d.	Evaluasi Internal	10	6,06
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	12,25
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70,90</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,78** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **1,50**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya dan dokumen Renstra tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,53** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi telah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai, namun dokumen PK tersebut belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga

mengurangi akuntabilitas Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.

b) **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan**

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) **Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan**

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **17,50** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **3,44** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya, dan mekanisme pengumpulan data kinerja, namun Dokumen IKU belum dipublikasikan ke website resmi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mengurangi akuntabilitas Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai, namun pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah

memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, akan tetapi IKU belum direviu secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,31** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi, namun Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja cukup memadai karena informasi yang disajikan sudah digunakan untuk penilaian kinerja.

### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,06** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **1,09** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi

Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

## **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,48** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

## **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **12,25** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU melalui website resmi Pemerintah yang memudahkan publik untuk mengakses.
- d. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- e. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- f. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar

dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

- g. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- h. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- j. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**INSPEKTUR,**  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di Jambi



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020.  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/657/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Humas dan  
Protokol Setda  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **55,24** yang menunjukkan dalam kategori **CC** atau **Cukup (Memadai)**

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,34
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,13
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,37
d.	Evaluasi Internal	10	4,12
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	8,28
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>55,24</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **22,34** dari nilai maksimal sebesar

**30,00.** Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

#### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

#### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,22** dari nilai maksimal **sebesar 5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi telah memadai.

#### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

#### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

#### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **8,50** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

#### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas

Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, hanya sebatas monitoring terhadap program dan kegiatan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **13,13** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **5,00**.

Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.

##### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan (data yang dikumpulkan belum didasarkan suatu mekanisme yang terstruktur, yaitu : jelas mekanisme pengumpul datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi).

##### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai karena dalam implementasinya IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **7,37** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,95** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum dapat diandalkan.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **4,12** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Humas dan

Protokol Setda Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

## **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,95** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program, tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja sedangkan evaluasi atas rencana aksi belum ada sehingga tidak dapat untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan-perbaikan yang dapat dilaksanakan.

## **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

## **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **8,28** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- c. Mekanisme pengumpulan data kinerja haruslah memadai, sehingga pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- d. Memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar

dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR,**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di Jambi



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, 4 September 2020  
16 Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/655/ITPROV-2/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Pembangunan  
dan Kerjasama Setda  
Provinsi Jambi  
di -  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/224/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
7	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **57,55** yang menunjukkan dalam kategori **CC atau Cukup (Memadai)**.

5. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,25
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,88
c.	Pelaporan Kinerja	15	5,75
d.	Evaluasi Internal	10	3,84
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	5,83
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>57,55</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 40 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **25,25** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Dokumen Perencanaan Strategis**

###### **a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra**

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,83** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra telah memadai, karena Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU, namun belum membuat indikator tujuan beserta target keberhasilannya.

###### **b) Kualitas Dokumen Renstra**

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah memadai.

###### **c) Implementasi Dokumen Renstra**

Implementasi dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

1. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### **2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

###### **a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan**

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari :

Rencana Aksi atas kinerja telah dibuat, namun kinerja yang telah diperjanjikan belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, hanya sebatas monitoring terhadap program dan kegiatan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16,88** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan.

**2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **9,69** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja sudah cukup memadai, namun terdapat beberapa perbaikan antara lain :

Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan secara berkala, sehingga pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja mendapat nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi kurang memadai. Hal tersebut karena IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar

pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 17 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **5,75** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan mendapat nilai sebesar **2,63** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan telah disampaikan tepat waktu, namun laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

#### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar **2,23** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi. Kelemahan dalam sistem pelaporan kinerja antara lain, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

#### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar **0,90** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja kurang memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 26 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **3,84** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **1,42** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi belum memadai karena belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi mendapat nilai sebesar **1,67** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi baru sebatas evaluasi terhadap program dan tidak terdapat bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi mendapat nilai sebesar **0,75** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **5,83** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

#### **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan beserta target keberhasilan agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- d. Melakukan reviu internal atas IKU secara periodik sebagai upaya meningkatkan kualitas indikator agar lebih relevan dan cukup mempresentasikan kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan.  
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- e. Melakukan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- f. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- g. Evaluasi program yang telah dibuat agar ditindaklanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

**Dr. H. KAILANI, S.H., M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di Jambi



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, September 2020  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV-3/IX/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Perekonomian  
dan Sumber Daya Alam setda  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomo

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

WPJ	PT	KT

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 77,58 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,95
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	6,48
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,58
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>77,58</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>

WPJ	PT	KT

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **25,63** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra sudah memadai.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,06** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan revidi secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,5** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,6** dari nilai maksimal sebesar **6**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum sepenuhnya memadai.

WPJ	PT	KT

## b. Pengukuran Kinerja

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **18,13** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Pemenuhan pengukuran kinerja telah cukup memadai.

### 2) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **9,38** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai.

### 3) Implementasi Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi belum memadai karena:

- (1) Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- (2) IKU belum direviu secara berkala.

## c. Pelaporan Kinerja

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **12,31** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### 2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **5,71** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,6** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

WPJ	PT	KT

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **6,85** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi belum cukup memadai karena hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **16,16** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **5,5** dari nilai maksimal sebesar **7,5**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **10,66** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja cukup dapat diandalkan.

WPJ	PT	KT

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002

WPJ	PT	KT



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustus 2020  
Muharram 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Organisasi  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

## 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Organisasi Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 62.91 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Biro Organisasi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	28.80
b.	Pengukuran Kinerja	25	15.00
c.	Pelaporan Kinerja	15	14.10
d.	Evaluasi Internal	10	7.56
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	10
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62.91</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **28.80** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **2.00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra sudah memadai, karena Biro Organisasi Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021 sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **5** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Organisasi Provinsi Jambi sudah memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar **3.00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RK
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD .

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **4.00** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **10** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Organisasi Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **4,80** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **15,00** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4.38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Organisasi Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya , tetapi belum optimal..

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **8.13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **2.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Organisasi Provinsi Jambi cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **14.10** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3.00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Organisasi Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **7.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Organisasi Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Organisasi Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena Informasi yang

disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Organisasi Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **7.56** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Organisasi memperoleh nilai sebesar **2.00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Organisasi Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3.68** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1,88** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Organisasi Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **10.00** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **7.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **5.00** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja cukup dapat tercapai.
- (2) Capaian kinerja cukup lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Organisasi Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Organisasi Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H.KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000  
J A M B I – 36122

Jambi, Agustusl 2020  
Muharam 1442 H

Nomor : LAP-700/ /ITPROV/VIII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Pemerintahan  
Provinsi Jambi  
di  
**Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2019, hasil evaluasi dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/51/SPT/ITPROV-1.1/IV/2019 tanggal 4 April 2019

**2. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP OPD;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

**3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:**

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan “ kategori peringkat“ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Biro Pemerintahan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 69.51 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di Biro Pemerintahan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23.70
b.	Pengukuran Kinerja	25	16.25
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.61
d.	Evaluasi Internal	10	7.18
e.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	11.77
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>69.51</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari pengujian terhadap 39 indikator pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang dicapai sebesar **23.70** dari nilai maksimal sebesar **30,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Dokumen Perencanaan Strategis

###### a) Tingkat Pemenuhan Dokumen Renstra

Tingkat Pemenuhan dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **1,72** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Biro Pemerintahan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik.

###### b) Kualitas Dokumen Renstra

Kualitas dokumen Renstra mendapat nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Dokumen Renstra yang dibuat Biro Pemerintahan Provinsi Jambi sudah cukup memadai.

###### c) Implementasi Dokumen Renstra

Implementasi dokumen Renstra memperoleh nilai sebesar 2,25 dari nilai maksimal sebesar **3,00**.

Implementasi atas dokumen Renstra yang dievaluasi telah memadai, hal ini terlihat dari :

- (1) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA.
- (2) Telah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan.

##### 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

###### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal sebesar **4,00**. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai.

###### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai sebesar **8,00** dari nilai maksimal sebesar **10,00**. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Biro Pemerintahan Provinsi Jambi belum memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai.

###### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Implementasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan yang dibuat belum memadai hal ini terlihat dari :

- (1) Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (2) Target kinerja belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **b. Pengukuran Kinerja**

Dari pengujian terhadap 20 indikator kinerja, nilai yang dicapai **16.25** dari nilai maksimal sebesar **25,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Pemenuhan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **4.38** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Pemerintahan Provinsi Jambi beserta penanggungjawabnya, tetapi belum optimal.

### **2) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kualitas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar **8.13** dari nilai maksimal sebesar **12,50**.

Kualitas pengukuran kinerja rata-rata untuk tingkat OPD telah cukup memadai namun perlu perbaikan sebagai berikut :

- (1) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU OPD.
- (2) Belum sepenuhnya dilakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.

### **3) Implementasi Pengukuran Kinerja**

Implementasi Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **3.75** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi belum memadai karena dalam implementasinya belum memenuhi indikator-indikator yang baik seperti, IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

## **c. Pelaporan Kinerja**

Dari pengujian terhadap 16 indikator pada komponen tersebut, nilai yang dicapai sebesar **10.61** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Pemenuhan Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **3.00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Biro Pemerintahan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

### **2) Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **4.91** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Provinsi Jambi.

### **3) Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai sebesar **2.70** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Hasil penilaian atas dokumen Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Provinsi Jambi diketahui bahwa pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya memadai karena

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Dari hasil pengujian terhadap 12 indikator, evaluasi internal atas kinerja Biro Pemerintahan Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **7.18** dari nilai maksimal sebesar **10,00**.

Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan. Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan Evaluasi kinerja Biro Pemerintahan memperoleh nilai sebesar **2.00** dari nilai maksimal sebesar **2,00**. Pemenuhan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Provinsi Jambi telah cukup memadai.

##### **2) Kualitas Evaluasi**

Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar **3.68** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja belum cukup memadai karena pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan belum dalam sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan.

##### **3) Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar **1.50** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan keberhasilan unit kerja.

#### **e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari pengujian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Biro Pemerintahan Provinsi Jambi mendapat nilai sebesar **11.77** dari nilai maksimal sebesar **20,00**. Dengan demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dan memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Kinerja yang dilaporkan (Output)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas output mendapat nilai **7.50** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Hal ini terlihat dari penilaiain indikator yang meliputi :

- (1) Target kinerja tercapai.
- (2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- (3) Informasi kinerja dapat diandalkan.

##### **2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome)**

Capaian kinerja yang dilaporkan atas outcome mendapat nilai sebesar **4.27** dari nilai maksimal sebesar **12,50**. Hal ini terlihat dari penilaian indikator yang meliputi :

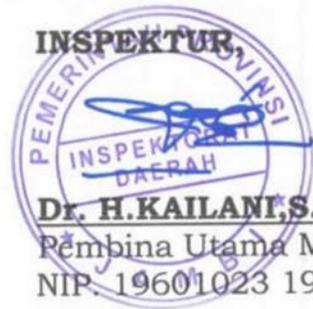
- (1) Target kinerja belum tercapai.
- (2) Informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
- b. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Biro Pemerintahan Provinsi Jambi dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198903 1 002